



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Barito
- b.
- c. Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

= 3 =

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran ADD setiap desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}{(ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Angka Bobot untuk variabel ADD sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| a. jumlah penduduk | = 25 % |
| b. angka kemiskinan | = 35 % |
| c. luas wilayah | = 10 % |
| d. <u>indeks kesulitan geografis</u> | = 30 % |
| j u m l a h | = 100 % |

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa tahun 2017 yang sudah di evaluasi oleh Camat dan diverifikasi kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%);
 - d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan / tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; dan
 - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lambaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Penetapan ADD pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk Alokasi Dana Desa adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama kepala desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

Pasal 11

Penggunaan Alokasi Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

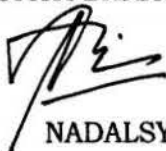
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara


Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2016,


BUPATI BARITO UTARA


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA


JAINAL ABIDIN

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	
KONSEPTOR (.....)	
PENANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

JABATAN	PARAF
SEKDA KESRA BARIT	
ASISTEN.....	
KABAG HUKUM, KAB	
KASUBBAG / KASUB	
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 48 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	KECAMATAN /DESA	TOTAL ADD	ADD	
			TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN MONTALLAT			
1	SIKAN	743,187,000	445,912,200	297,274,800
2	RUBEI	516,596,000	309,957,600	206,638,400
3	PEPAS	483,785,000	290,271,000	193,514,000
4	RUJI	403,005,000	241,803,000	161,202,000
5	PARING LAHUNG	416,417,000	249,850,200	166,566,800
6	KAMAWEN	473,306,000	283,983,600	189,322,400
	JUMLAH	3,036,296,000	1,821,777,600	1,214,518,400
II	KECAMATAN GUNUNG TIMANG			
1	MALUNGAJ	418,932,000	251,359,200	167,572,800
2	RARAWA	380,684,000	228,410,400	152,273,600
3	KETAPANG	375,988,000	225,592,800	150,395,200
4	WALUR	411,314,000	246,788,400	164,525,600
5	BALITI	408,099,000	244,859,400	163,239,600
6	MAJANGKAN	499,672,000	299,803,200	199,868,800
7	KANDUI	678,989,000	407,393,400	271,595,600
8	PAYANG ARA	419,013,000	251,407,800	167,605,200
9	JAMAN	411,937,000	247,162,200	164,774,800
10	PELARI	415,669,000	249,401,400	166,267,600
11	SANGKORANG	432,943,000	259,765,800	173,177,200
12	SIWAU	401,883,000	241,129,800	160,753,200
13	TONGKA	509,526,000	305,715,600	203,810,400
14	BATU RAYA I	538,914,000	323,348,400	215,565,600
15	BATU RAYA II	496,339,000	297,803,400	198,535,600
16	TAPEN RAYA	383,753,000	230,251,800	153,501,200
	JUMLAH	7,183,655,000	4,310,193,000	2,873,462,000
III	KECAMATAN GUNUNG PUREI			
1	TANJUNG HARAPAN	415,712,000	249,427,200	166,284,800
2	LINON BESI I	390,113,000	234,067,800	156,045,200
3	LINON BESI II	374,683,909	224,810,345	149,873,564
4	MUARA MEA	393,654,000	236,192,400	157,461,600
5	LAWARANG	398,125,000	238,875,000	159,250,000
6	LAMPEONG I	396,132,000	237,679,200	158,452,800
7	LAMPEONG II	405,655,000	243,393,000	162,262,000
8	PAYANG	402,305,000	241,383,000	160,922,000
9	BERONG	385,844,000	231,506,400	154,337,600
10	BAOK	396,352,000	237,811,200	158,540,800
11	TAMBABA	384,791,000	230,874,600	153,916,400
	JUMLAH	4,343,366,909	2,606,020,145	1,737,346,764
IV	KECAMATAN TEWEH TIMUR			
1	SAMPIRANG I	452,390,000	271,434,000	180,956,000
2	SAMPIRANG II	505,129,000	303,077,400	202,051,600
3	LIJU	426,283,000	255,769,800	170,513,200
4	BENANGIN III	414,819,000	248,891,400	165,927,600
5	BENANGIN II	558,704,000	335,222,400	223,481,600
6	BENANGIN V	536,192,000	321,715,200	214,476,800
7	BENANGIN I	554,782,000	332,869,200	221,912,800
8	MUARA WAKAT	425,533,000	255,319,800	170,213,200
9	MAMPUAK I	653,100,000	391,860,000	261,240,000
10	JAMUT	472,974,000	283,784,400	189,189,600
11	SEI LIJU	517,877,000	310,726,200	207,150,800
12	MAMPUAK II	484,251,000	290,550,600	193,700,400
	JUMLAH	6,002,034,000	3,601,220,400	2,400,813,600

1	2	3	4	5
V	KECAMATAN TEWEH TENGAH			
1	LEMO I	519,172,000	311,503,200	207,668,800
2	LEMO II	1,016,921,541	610,152,925	406,768,616
3	PANDREH	714,950,000	428,970,000	285,980,000
4	RIMBA SARI	476,711,000	286,026,600	190,684,400
5	SEI RAHAYU I	451,213,000	270,727,800	180,485,200
6	SEI RAHAYU II	393,524,000	236,114,400	157,409,600
7	BERINGIN RAYA	448,517,000	269,110,200	179,406,800
8	DATAI NIRUI	454,748,000	272,848,800	181,899,200
	JUMLAH	4,475,756,541	2,685,453,925	1,790,302,616
VI	KECAMATAN LAHEI			
1	IPU	485,264,000	291,158,400	194,105,600
2	MUKUT	609,117,000	365,470,200	243,646,800
3	MUARA BAKAH	436,436,000	261,861,600	174,574,400
4	JUJU BARU	513,737,000	308,242,200	205,494,800
5	MUARA INU	503,569,000	302,141,400	201,427,600
6	BENGAHON	424,418,000	254,650,800	169,767,200
7	RAHADEN	453,393,000	272,035,800	181,357,200
8	MUARA PARI	455,038,000	273,022,800	182,015,200
9	HARAGANDANG	448,489,000	269,093,400	179,395,600
10	KARENDAN	518,943,000	311,365,800	207,577,200
11	HURUNG ENEP	475,275,000	285,165,000	190,110,000
	JUMLAH	5,323,679,000	3,194,207,400	2,129,471,600
VII	KECAMATAN TEWEH BARU			
1	LIANG NAGA	593,967,000	356,380,200	237,586,800
2	SABUH	777,905,000	466,743,000	311,162,000
3	HAIJAK	879,997,000	527,998,200	351,998,800
4	MALAWAKEN	655,740,000	393,444,000	262,296,000
5	SIKUI	545,046,000	327,027,600	218,018,400
6	PANAEN	487,946,000	292,767,600	195,178,400
7	LIANG BUAH	571,163,000	342,697,800	228,462,800
8	GANDRING	495,937,000	297,562,200	198,374,800
	JUMLAH	5,007,701,000	3,004,620,600	2,003,001,400
VIII	KECAMATAN TEWEH SELATAN			
1	TRAHEAN	418,017,000	250,810,200	167,483,800
2	TRINSING	551,335,000	330,801,000	220,534,000
3	BINTANG NINGGI I	444,563,000	266,737,800	177,825,200
4	BINTANG NINGGI II	488,652,000	293,191,200	195,460,800
5	BUTONG	526,818,000	316,090,800	210,727,200
6	BUNTOK BARU	455,685,000	273,411,000	182,274,000
7	BUKIT SAWIT	657,862,000	394,717,200	263,144,800
8	TAWAN JAYA	427,819,000	256,691,400	171,177,600
9	PANDRAN RAYA	447,215,000	268,329,000	178,886,000
10	PANDRAN PERMAI	407,354,000	244,412,400	162,941,600
	JUMLAH	4,825,320,000	2,895,192,000	1,930,128,000
IX	KECAMATAN LAHEI BARAT			
1	NIHAN HILIR	500,299,000	300,179,400	200,179,600
2	NIHAN HULU	423,970,000	254,382,000	169,588,000
3	LUWE HILIR	438,600,000	263,160,000	175,440,000
4	LUWE HULU	474,769,000	284,861,400	189,907,600
5	JANGKANG BARU	467,192,000	280,315,200	186,876,800
6	JANGKANG LAMA	423,740,000	254,244,000	169,496,000
7	PAPAR PUJUNG	527,928,000	316,756,800	211,171,200
8	TELUKMALEWAI	461,839,000	277,103,400	184,735,600
9	BENAO HILIR	477,946,000	286,767,600	191,178,400
10	BENAO HULU	510,481,000	306,288,600	204,192,400
11	KARAMUAN	486,227,000	291,736,200	194,490,800
	JUMLAH	5,192,991,000	3,115,794,600	2,077,196,400
	KANTON PMD	45,390,799,450	27,234,479,670	18,156,319,780

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEKDA

KANTON PMD

KABID

KASUBBID

KONSEPTOR

PELAKSANA/PENGETIK

BUPATI DARIT UTARA

(Signature)
NADALSYAH

BAGIAN HUKUM

SEKDA

PEMERINTAHAN DESA

BAGIAN HUKUM

BAG

SEKTOR

TUGAS JAWAB

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK

PELAKSANA/PENGETIK